



DIPLOMASI KERJASAMA INDONESIA KOREA SELATAN DALAM PENGADAAN ALUTSISTA (2019- 2022)

Yogi Satria¹, Sri Yunanto²

¹Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Article history

Received: 20 Agustus 2024

Revised: 21 Agustus 2024

Accepted: Agustus 2024

*Corresponding author

satriayogi33@gmail.com

Abstrak

Pengadaan alat utama dalam industri pertahanan merupakan satu hal tidak kalah penting yang harus diperhatikan setiap negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanannya. Selama ini sistem pertahanan Indonesia masih kurang optimal sehingga memerlukan adanya jalinan kerjasama. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana diplomasi kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam Pengadaan Alutsista 2019-2023. Dengan menggunakan teori National Interest, Kapabilitas Militer, dan Kerjasama Pertahanan, hasil dari penelitian ini untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia dalam kolaborasi kerjasama pertahanan dalam pengadaan alutsista. Indonesia berupaya untuk meningkatkan MEF dalam RPJM di era Presiden Jokowi. Pemerintah telah menunjukkan sebuah komitmennya untuk membangun dan mengembangkan industri pertahanan yang mandiri. Kerjasama Indonesia-Korea Selatan menjadi sebuah kerjasama yang menjajikan, PT. Pindad dan Daewoo Shipbuilding bisa berbagi pengetahuan, teknologi (ToT), dan pengalaman

Kata Kunci: Kerjasama, Alutsista, Transfer Of Technology, Korea Selatan

Abstract

Procurement of primary equipment in the defense industry is one thing that is no less important that must be considered by every country to maintain its sovereignty and security. So far, Indonesia's defense system is still less than optimal, so it requires cooperation. The purpose of this study is to examine how Indonesia-South Korea's diplomatic cooperation in the Procurement of Defense Equipment 2019-2023. By using the theory of National Interest, Military Capability, and Defense Cooperation, the results of this study are to improve Indonesia's defense capabilities in collaboration on defense cooperation in the procurement of defense equipment. Indonesia is trying to increase the MEF in the RPJM in the era of President Jokowi. The government has shown its commitment to building and developing an independent defense industry. The Indonesia-South Korea cooperation is a promising cooperation, PT. Pindad and Daewoo Shipbuilding can share knowledge, technology (ToT), and experience

Keywords: Cooperation, Defense Equipment, Transfer Of Technology, South Korea

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas yaitu 8,3 juta kilometer persegi yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan industri pertahanan dan sektor ekonomi lainnya berkat sumber daya dan potensi sumber daya nasional yang melimpah. Sebagai negara yang memiliki luas area wilayah sepanjang 1.916.906,77 km² dengan dan luas jumlah pulau 16.766 dengan luas perairannya sekitar 3.110.000 km² Indonesia harus cukup dari pertahanan yang mampu untuk mengawasi kedaulatan negara (Badan Pusat Statistik, 2021).

Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga di laut ialah India, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines, Palau, Australia, Timor-Leste, dan Papua New Guinea. Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor-Leste adalah negara tetangga di darat (Kementerian ESDM) Tanpa adanya sistem pertahanan yang kuat, bisa dipastikan bahwa negara tersebut bisa hancur karena sangat mudah untuk negara lain mengganggu keamanan suatu negara.

Dengan adanya tujuan pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan dan keamanan tertera di Pasal 3 yang berbunyi “Mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan keamanan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal dan memandirikan sistem pertahanan dan keamanan” dalam hal lain Indonesia memiliki 2 ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam pengertian khusus disebutkan pada Pasal 1 ayat 1 yang mana Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Peraturan Pemerintah RI 2002). Sementara itu pengadaan alat utama dalam industri pertahanan merupakan Satu hal tidak kalah penting yang harus di perhatikan jika ingin menjaga keamanan dan kedaulatannya. Dengan memiliki area wilayah yang luas dan strategis, pemerintah Indonesia kelola sistem pertahanan secara keseluruhan fungsinya untuk mengusahakan kepentingan nasional dan mendukung adanya kebijakan pertahanan nasional.

Untuk memenuhi itu dan keterbatasan tersebut Indonesia sedang gencar terhadap percepatan pembangunan pertahanannya, saat ini di selenggarakan melalui yang dituangkan pada kebijakan Minimum Essential Force (MEF) MEF merupakan amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010. Selain itu kebijakan MEF mengacu kepada sejumlah dan kapasitas kekuatan alutsista minimal yang dibutuhkan oleh negara untuk melawan ancaman yang terlihat (Peraturan Pemerintah RI, 2010). Tujuan utama MEF membentuk komponen TNI. Dan selain itu MEF menjadi sebuah gerakan subjek strategis pertahanan nasional sehingga Implementasi MEF terbagi dalam tiga rencana strategis atau Renstra, yaitu Renstra 1 2010-2014, Renstra 2 : 2015-2019 dan Renstra 3 : 2020-2024 (The Global Reviw, 2018). Dalam mencapai strategi Indonesia, Indonesia telah melangsungkan diplomasi pertahanan bilateral

selama beberapa dekade kunjungan ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, China, Thailand, 3 Jepang, Korea Selatan, Rusia, Brunei, Turki, dan Prancis (Gindarsah, 2016).

Dengan menjalin hubungan yang mengarah pada peningkatan kolaborasi internasional dalam bentuk berbagai perjanjian internasional, termasuk perjanjian di bidang pertahanan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945), tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk berpartisipasi dalam kerja sama pertahanan internasional. Untuk itu dalam perbaikan transformasi militer dan modernisasi alutsista pada sektor pertahanan Indonesia secara mandiri memproduksi Alutsista diantaranya adalah Maung PT.Pindad, Panser Anoa, Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV), Pesawat CN325. Sedangkan disisi lain tidak bisa maksimal dilakukan dan masih membutuhkan kerjasama pertahanan dengan negara lain yang lebih maju dalam bidang teknologi, dengan itu Indonesia memilih dengan salah satu negara untuk menjalin hubungan kerjasama terkhususnya pada bidang militer yaitu Korsel.

KERANGKA TEORITIS

National Interest

Hubungan internasional, gagasan tentang kepentingan nasional sering kali diperdebatkan. Setiap negara harus mempunyai kepentingan nasional yang unik ketika mengembangkan rencana untuk memajukan kepentingannya dalam hubungan internasional. Para pengambil keputusan di setiap negara sering menggunakan kepentingan nasional sebagai ukuran atau standar untuk menentukan sikap atau tindakan mereka. Tentu saja terdapat perbedaan pendapat demi kepentingan nasional. Menurut Nuechterlin (1973), kepentingan nasional mengandung empat komponen: 1) Dimensi pertahanan, Keharusan suatu negara untuk membela rakyatnya dan dirinya sendiri terhadap ancaman kekerasan fisik dari negara lain terhadap sistem politik 2) Dimensi ekonomi, Merupakan tujuan pemerintah untuk menjaga perekonomian tetap stabil bahkan mengembangkannya melalui kerjasama ekonomi internasional. 3) Dimensi politik, Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam rangka melestarikan sistem politik bangsa dan melaksanakan eksternalisasi politik. 4) Dimensi ideologis, Pentingnya suatu bangsa mempertahankan prinsip-prinsipnya terhadap tantangan ideologi lain.

Kapabilitas Militer

Postur pertahanan negara tersusun sebuah kemampuan dalam menggelar kekuatan pertahanan, kapabilitas pertahanan untuk menangkal dan mengatasi berbagai ancaman dengan adanya kapabilitas bisa menguatkan kemampuan yang diwujudkan dalam postur pertahanan. Pandangan saxena pada kapabilitas yang didefinisikan sebagai kapasitas untuk menghasilkan dampak tertentu pada operasional, yang tergerak oleh elemen risiko, lingkungan fisik, dan kontribusi anggota koalisi. Sedangkan ada beberapa negara dunia membangun persenjataan nya. Standar penangkalan, atau kemampuan untuk menangkal dan mengatasi ancaman, adalah tingkat

kemampuan pertahanan negara yang diinginkan (Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007).

Dalam membangun pertahanan atau penyerangan konteks penyerangan yang bertujuan dimana kapabilitas militer digunakan untuk kepentingan nasional atau dengan cara lain seperti invansi ke negara lain sementara pertahanan berfungsi sebagai perlindungan dan bersifat psikologis. Sementara itu, militer persenjataan memiliki beberapa fungsi penting bagi negara diantaranya. Tiga konsep ini yang kerap sering di gunakan banyak negara untuk membangun kapabilitas militernya. Berikut diantaranya a) Deterrence, Penggunaan tindakan militer sebagai alat pencegah untuk mencegah pihak lain melakukan hal yang tidak diinginkannya dapat disebut sebagai ancaman pembalasan. b) Defense, mengacu pada tujuan dan kegiatan pertahanan negara, yang mencakup pengerahan angkatan bersenjata untuk melancarkan serangan dan penggunaan kekuatan tersebut jika terjadi serangan. c) Compellence, mengacu pada penggunaan kekuatan bersenjata untuk menghentikan pihak lawan, baik mereka melakukannya atau tidak. Pemaksaan dapat dilakukan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan (Robert & Jervis, 2008).

Kerjasama Pertahanan

Kerjasama pertahanan upaya transaksi Internasional yang sebagian dilakukan dua atau lebih negara untuk mencapai sebuah tujuan untuk meningkatkan dan sebuah efisiensi pertahanan. Kerjasama pertahanan merupakan salah satu bagian komponen dari diplomasi pertahanan, dan dalam upayanya menumbuhkan rasa saling percaya berdasarkan sebuah prinsip timbal balik dan profitabilitas. Upaya kerja sama ini berpotensi memperkuat institusi, mendorong dialog strategis, dan meningkatkan stabilitas. meningkatkan kepercayaan dan keamanan, memperkuat adanya pemeriksaan demokratis, reformasi militer, dan latihan militer. Menurut Syawfi (2009), Komponen diplomasi, pertahanan, dan pembangunan berkontribusi pada keberhasilan strategi diplomasi pertahanan. ada tiga ciri utama diplomasi pertahanan suatu negara: 1. Defense diplomacy for confidence building measures 2. Defense diplomacy for defense capabilities 3. Defense diplomacy for defense industry.

Untuk menjaga dan memperkuat pertahanan serta kedaulatan stabilitas wilayah pada kerjasama bidang pertahanan. Seringkali menggunakan sebuah kesepakatan, perjanjian secara tertulis melalui kesepakatan-kesepakatan kerjasama, hal tersebut memiliki tujuan untuk melakukan perjanjian dengan dua negara atau bisa lebih. Kerja sama dilakukan secara bilateral maupun multiteral. Sebagai contoh kerjasama, Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan pertukaran intelijen atau Intelligence Exchange Group (IEG).

Kerja sama pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam situasi global saat ini, ketika keamanan dan stabilitas menjadi semakin kompleks secara global dan konflik sering kali muncul di berbagai lokasi. Gagasan kerja sama pertahanan yang sangat penting bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Kerja sama bilateral: Gagasan ini menggambarkan kesepakatan antara dua negara untuk bekerja sama dalam isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. 2) Kerjasama regional: Gagasan ini merupakan kolaborasi negara-negara di kawasan yang sepakat untuk bekerja sama dalam masalah pertahanan dan keamanan.

Terdapat adanya tiga dasar konsep yang melandasi dalam pembentukan kerja sama pertahanan diantaranya adalah : a) Penilaian ancaman: Setiap negara melakukan penilaian ancaman. tradisional dan non-tradisional yang berasal dari aktor domestik dan nondomestik. Negara akan membuat rencana pertahanan untuk menangkal dan mengatasi ancaman tersebut berdasarkan penilaian ancaman tersebut. b) Kondisi negara: Perubahan lingkungan strategis negara dan kemajuan juga memengaruhi pembentukan kerjasama pertahanan. Dinamika yang berkembang dalam lingkungan strategis akan menyebabkan perubahan. Selain itu, peta kekuatan regional dan pola interaksi antarnegara akan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis. Oleh karena itu, kondisi negara akan membentuk proses kerjasama pertahanan. c) Kemajuan teknologi persenjataan: Alat persenjataan setiap negara menunjukkan kekuatan militernya. Oleh karena itu, tujuan kerja sama pertahanan di bidang alutsista adalah untuk menyelesaikan memenuhi pengadaan alutsista pertahanan suatu bangsa dan modernisasinya (Sinamora, 2013). Sebuah penelitian dan untuk peningkatan efektivitas SDM merupakan elemen yang perlu dikembangkan secara bersamaan (Indodefense.com, 2021).

METODE

Peneliti ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berfungsi sebagai mengumpulkan data dan melakukan analisis. Pemanfaatan metodologi untuk menggambarkan dan menerangi kejadian-kejadian saat ini, baik alami maupun buatan, dengan penekanan pada karakteristik, fitur, dan keterkaitan antara beragam aktivitas (Sukmadinata, 2017). Teknik melakukan penelitian library research digunakan untuk mempersiapkan penelitian ini. Dengan data kualitatif yang lebih unggul dari kualitas objek penelitian karena memuat banyak informasi yang relevan. Penelitian dapat difokuskan pada kejadian-kejadian yang digambarkan oleh informasi yang dikumpulkan baik secara verbal maupun nonverbal. Siregar, Ameilia Zuliyanti & Harahap (2019) Peneliti menggunakan jurnal, laporan, disertasi, skripsi, dan website berita sebagai data.

Hasil dan Pembahasan

Lingkungan Strategis

Penyediaan pertahanan negara di pengaruhi oleh perkembangan strategis yang terus berubah sesuai dengan geopolitik dunia. Pergerakan yang harus diperhatikan pada jangka setidaknya lima tahun kedepan, dan melihat dari sisi perkembangan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan militer, terutama area wilayah Asia Pasifik. Adanya pergerakan ancaman militer, non-militer, serta ancaman hibrida 21 baik yang nyata maupun yang tidak nyata-serta pola dan jenis ancaman lain yang menjadi lebih kompleks dan beragam semuanya terkena dampak signifikan dari dinamika ini. Hal ini mencakup risiko-risiko seperti radikalisme dan terorisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran perbatasan, pembajakan dan pencurian sumber

daya, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, serta adanya konflik terbuka atau pula perang konvensional.

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan sebelumnya masih ada dan disebabkan oleh sejumlah penyebab mendasar yang semakin parah. Selain itu, isu-isu strategis yang sedang berlangsung di kawasan ini menarik perhatian seluruh dunia. Oleh karena itu, pengembangan strategi dan kebijakan pertahanan negara untuk melengkapi kebijakan pemerintah memerlukan pemahaman terhadap dinamika lingkungan strategis. Untuk itu Kemhan selalu memperbarui dinamika perkembangan lingkungan strategis (lingstra) dengan menggunakan peta strategis yang tepat. Perkembangan lingstra yang dinamis dan kompleks, baik ditingkat nasional, regional, maupun global, telah menyebabkan berbagai upaya ancaman, baik militer maupun non militer, yang akan mengacau pada kepentingan nasional masa depan. Tujuan dari penerapan peta strategis ini adalah menghasilkan Prajurit TNI yang Unggul serta memiliki alutsista yang modern dan mandiri.

Persepsi Treat Assesment

Persepsi Ancaman Korea Selatan Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah modern Korea Selatan. Ketegangan masih ada sejak Perang Korea (1950–1953), yang diselesaikan dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Korea Selatan terpaksa memperkuat pertahanannya melalui berbagai bentuk kerja sama internasional karena ancaman militer yang ditimbulkan oleh Korea Utara, terutama kemampuan nuklir dan rudal balistiknya (Yoga, 2020) Dan Konflik yang berakhir dengan gencatan senjata tidak dapat menjamin perdamaian yang menyeluruh dan berkelanjutan di Korea Selatan dan Korea Utara. (Lee, 2015) Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik di antara dua Korea adalah perbedaan ideologis Amerika Serikat memberikan pengaruh liberal pada Korea Selatan, sedangkan Uni Soviet memberikan pengaruh komunisme. Dengan adanya mempererat hubungan AS-Korea Selatan dan memperkuat kemampuan pertahanan konvensional, Korea Selatan menanggapi ancaman nuklir Korea Utara dengan meminta jaminan payung nuklir AS. Di bawah pemerintahan era Kim Dae Jung, Korea Selatan mendirikan Komite untuk Mempromosikan Reformasi Pertahanan dan mengeluarkan Rencana Reformasi Pertahanan Lima Tahun sesuai dengan Laporan Politik Pertahanan Dasar pada April 1998. Dengan mempererat hubungan AS-Korea Selatan dan memperkuat kemampuan pertahanan konvensional, Korea Selatan menanggapi ancaman nuklir Korea Utara dengan meminta jaminan payung nuklir AS. Dalam hal ini, komite tersebut dibentuk dengan tujuan meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata untuk menggunakan teknologi informasi dalam perang. Selain mengembangkan nuklir, Korea Selatan memiliki beberapa kebijakan untuk memastikan perlindungan dan keamanan bangsanya. Dengan kondisi negara koresel Sebagai sekutu Amerika Serikat, Korea Selatan segera mengikuti negara Adidaya tersebut dengan mengubah sektor pertahanan mereka untuk mengutamakan teknologi. "The Revolution in Military Affairs and The Defence Industry

in South Korea" oleh Chung-in Moon dan Jin-Young Lee, pemerintahan Presiden Roh Moo-Hyun mencanangkan program transformasi militer, salah satu contoh pemimpin yang berkontribusi pada kemajuan industri pertahanan Korea Selatan. Kebijakan ini telah 31 membuat industri pertahanan Korea Selatan maju, karena struktur militernya menjadi lebih efisien dan memiliki kemampuan untuk meningkat dengan cepat. Korea Selatan mendasarkan strategi militer dan keamanannya pada dua tingkatan ancaman nasional, yaitu : 1) Modifikasi dinamika kekuatan global di Asia Timur. 2) Ancaman Korea Utara terhadap keamanan Korea Selatan (Yang & Mas'ood, 2004) Tahun 2018 menjadi tahun implementasi deklarasi perdamaian "Rumah Perdamaian" oleh Korea Utara dan Selatan. Perjanjian kedua negara antara Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Harus di akui paling di signifikan, meskipun ada pihak menilai bahwa perjanjian tersebut adalah "bermain aman".

Pembicaraan bersejarah antara dua negara ini menghasilkan sejumlah perjanjian, antara lain: 1. Korea Utara dan Korea Selatan akan bekerja sama lebih erat untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain dan pada akhirnya bisa bersatu sendiri-sendiri. 2. Kedua negara akan melaukan hubungan kerjasama sama untuk mengurangi ketegangan konflik militer, dan yang ketiga, mereka akan bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian permanen di Semenanjung Korea Sementara itu, gencatan senjata masih di lakukan oleh Korea Utara. Menyisir pada tahun 2023 sejak mereka kerja sama untuk mewujudkan perdamaian Korut menembakkan sekitar 200 peluru artileri ke perairan lepas pada hal ini menimbulkan kerugian sipil Korea Selatan. Gencatan senjata tidak membuat Korsel tenang. Korsel dan Amerika Serikat berkumpul untuk membahas strategi nuklir yang dapat digunakan Korut. Presiden Joe Biden menegaskan dalam pertemuan tersebut bahwa dia akan berkomitmen kepada Presiden Yoon Sek Yoel untuk melindungi negaranya dari ancaman dari negara tetangga.

Hal ini mengingatkan Trilateralisme ketiga negara. yang menjadi alasan penting mengapa transformasi 32 paradigma menuju trilateralisme diperlukan sebagai dasar yang dapat memungkinkan kerja sama pertahanan yang menyeluruh antara AS, Jepang, dan Korsel. Reformasi aliansi bilateral menuju trilateral pada akhirnya akan mencakup peningkatan kemampuan pertahanan masing-masing negara tersebut melalui berbagai bentuk integrasi (Park, 2015) Oleh karena itu, nuklir Korut seolah-olah memaksa Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengupayakan membuat rencana baru dengan mengadopsi paradigma trilateralisme sebagai alat yang sangat efektif dan untuk menyatukan negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korsel.

Persepsi Ancaman Indonesia

Dinamika sengketa wilayah akibat tumpang tindih klaim di kawasan Laut merupakan permasalahan keamanan utama yang dihadapi kawasan ASEAN. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mulai "menyeret" perang LCS sejak tahun 2010. Dengan kondisi, negara Indonesia dan kemajuan teknologinya masih menjadi perhatian. Karena wilayahnya yang luas, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan masalah pertahanan. Sehubungan

dengan bidang pertahanan saat ini, Khususnya pada alat utama sistem pertahanan, yaitu alutsista, Indonesia masih kekurangan sistem pertahanan yang unggul. Alutsista merupakan salah satu perhatian utama dalam pembangunan pertahanan Indonesia. Sementara itu, Tiongkok menegaskan klaimnya atas perairan di sekitar Kepulauan Natuna dengan menggunakan dasar zona perairan tradisional. Tiongkok mempertahankan klaim sepihaknya atas perairan Natuna hingga tahun 2013, yang kemudian menimbulkan “ketegangan” antara Indonesia dan Tiongkok, yang mencapai puncaknya pada tahun 2016. Dengan adanya lonjakan pelaporan kapal penangkapan ikan Tiongkok dengan melakukan penangkapan ikan ilegal yang tidak terkendali perairan Indonesia pada bulan Maret, Mei, dan Juni 2016.

Hal serupa kembali dialami oleh Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Namun kali ini penjaga pantai Tiongkok juga ikut terlibat. terlibat selain kapal penangkap ikan. Menurut Kemlu, fokusnya 33 menyatakan untuk menyelesaikan forum diskusi pembicaraan mengenai Kode Etik (CoC) dan tata prilaku di laut Cina Selatan. Pada akhirnya, konfrontasi militer antar negara berpotensi merusak perdamaian dan stabilitas regional sekaligus menimbulkan tantangan baru bagi jalur perdagangan dan pelayaran global. Karena lokasinya di sepanjang Jalur Laut Perdagangan (SLOT) dan Jalur Laut Komunikasi (SLOC), yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Hindia, kawasan LCS mempunyai arti penting secara strategis, politik, dan ekonomi. Jika dipikir-pikir lagi, SLOC adalah jalur maritim yang menghubungkan pelabuhan dan digunakan untuk operasi pelayaran internasional seperti logistik, perdagangan, dan kapal angkatan laut. Sebagai jalur pelayaran internasional, SLOC juga berfungsi sebagai jalur pelayaran antara negara.

Dengan volume pelayaran mencapai 1.000 kapal per hari, jalur ini juga memudahkan pengiriman barang perdagangan maritim seperti minyak mentah. Mengingat tanda-tanda kekhawatiran mengenai serangan tak terduga yang dilakukan oleh negara adidaya besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya, Tiongkok bertekad untuk lebih meningkatkan dan memperkuat aparat militernya guna mengimbangi pertumbuhan kekuatan ekonominya. Sukmadinata, (2017), Selain meningkatkan teknologi dan persenjataan militer, modernisasi militer Tiongkok telah meningkatkan kapasitas kelembagaan, hubungan sipilmiliter, dan bidang lain yang meningkatkan kemampuan pertahanan militer negara tersebut. Purwanto (2010), hal ini sangat membahayakan sektor keamanan Indonesia terkhususnya di Natuna. Kedatangan nelayan dan kapal penjaga pantai China. Suatu strategi untuk mempertahankan klaim wilayah. Pada tahun 2021, China memprotes Indonesia melakukan pengoboran minyak dan gas alam di Natuna. Reuters (2021) Untuk menghentikan kapal-kapal milisi Tiongkok memasuki wilayah Indonesia, Indonesia harus meningkatkan pertahanannya. Selanjutnya, Kepulauan Natuna bagian utara adalah bagian (ZEE) Indonesia diklaim oleh Tiongkok. Selain itu, hal ini akan mengarah pada skenario di mana Tiongkok dan Indonesia sering kali saling bersitegang. Hal ini disebabkan oleh kesadaran Indonesia akan potensi bahaya Tiongkok terhadap munculnya kekuatan kedaulatan di kawasan. Sulistyani Pertiwi & Sari (2021) Dalam forum ADMM RI ke-8, Menhan Prabowo. Dan dihadiri oleh delegasi menhan negara-negara asean. Indonesia menyakini semua

permasalahan bisa di selesaikan yang terjadi di area kawasan. . “We are convinced that China is being led by wise leader, the US also as wise statesman and all leaders of the great powers we see” (Iqbal, 2021).

Kapabilitas Militer

Komponen Pertahanan Upaya dalam menghadapi ancaman militer, TNI menetapkan sebagai komponen pertahanan negara. Hal ini di perkuat dengan aspek lain kekuasaan negara untuk menghadapi ancaman besar, sistem pertahanan negara memberikan prioritas pertahanan maupun diluar intansi tersebut untuk melawan ancaman nonmiliter. Untuk mengupayakan pemberantasan segala ancaman musuh asing, ancaman terhadap keamanan nasional, dan bahaya terhadap keselamatan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Undang-undang pertahanan negara mendefinisikannya sebagai sistem pertahanan awal di seluruh dunia yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah secara terpadu dan tepat sasaran untuk menjaga keamanan nasional, keutuhan wilayah, dan kedaulatan negara dari segala ancaman. Ada Komponen Utama Komponen utama adalah TNI yang sigap dalam bertugas untuk menegakkan sebuah kedaulatan bangsa serta mempertahankan semua keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa 2) Komponen Cadangan Dengan adanya komcad, warga negara mengikuti rangka memperkuat dan memperluas komponen utama dan mereka mnenjadi bagian komponen cadangan 3) Komponen Pendukung Komponen pendukung terdiri dari atas kemauan warga negara, untuk membela dan meningkatkan sebuah kekuatan dan kemampuan untuk memabantu menjaga

Defense Kapability

Di tengah ancaman multidimensional, Penting untuk meningkatkan atau memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai bahaya (*conditio sine qua non*). Respon, baik verbal maupun nonverbal, merupakan bentuk penguatan, konteks militer respons ini jelas merupakan tanggapan terhadap ancaman yang melanda Republik Indonesia. Suatu penguatan diperlukan untuk mendorong tindakan dan koreksi dengan memberikan informasi atau umpan balik kepada Republik Indonesia. Menghadapi ancaman penguatan ini, ketahanan nasional harus menjadi prioritas utama ntuk itu mengukur dari segi kekuatan, menurut Global Fire Index, Pada tahun 2024 dan kekuatan militer Indonesia masuk dalam kategori 15 besar kekuatan militer global pada indeks GFP menunjukkan untuk tinjauan tahunan (Kementerian Pertahanan, 2019).

Daftar GFP lebih dari 60 faktor formula untuk menentukan skor indeks kekuatan. Disamping itu, kekuatan militer harus di dampingi dengan kekuatan alutsista. Oleh karena itu, diantaranya banyak nya pengadaan Alutsista TNI AD. Kendaraan tempur lapis baja : Sebanyak 1.430 unit, Artileri Tarik: 336 unit, Tank: 331. Artileri Swagerak: 153. Peluncur Roket: 63 unit. TNI AL Kapal Patroli: 179 unit, Kapal Korvet: 24 unit, Kapal Penyapu Ranjau: 10 unit, Kapal Fregat: 7 unit, Kapal Selam: 5 unit. TNI AU Helikopter, Helikopter Tempur, Pesawat Intai, Pesawat Latih, Pesawat Angkut, Pesawat Tempur, Pesawat Serang

Darat. Personel TNI aktif menjadi peran penting untuk menjaga, TNI bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Menurut data GFP. Indeks jumlah militer Indonesia mencapai total militer staf 1.050.000. Diantaranya personel aktif, personel cadangan dan paramiliter

National Interest

National interest Indonesia dan Koresel pada bagian ini. Oleh karena itu, pembahasan kepentingan nasional adalah sebuah konsep yang sering dibicarakan dalam agenda forum internasional. Adapun yang mengacu kepentingan Indonesia dalam hubungan internasional, proses interaksi mengacu pada bagaimana sistem hubungan internasional dapat berjalan dengan cara di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk membuat keputusan.

Aspek ekonomi dan sumber daya dimasukkan dalam bentuk kolaborasi. Pengembangan alutsista yang mandiri dan kontemporer merupakan salah satu hasil dari kemitraan ini, dan Indonesia masih berupaya untuk memperoleh alutsista. Dalam industri pertahanan yang berpusat pada pertahanan militer, pengembangan kekuatan pertahanan maritim melalui pemanfaatan teknologi satelit, sistem drone, atau perolehan alutsista mendapat prioritas, seiring dengan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF). Indonesia telah berkolaborasi secara luas dengan negaranegara lain di berbagai bidang seperti pelatihan militer bersama, pembelian alutsista, peningkatan alutsista, dan Transfer Of Teknologi (ToT). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) era Presiden Jokowi tahun 2015–2019 membahas arah postur kebijakan pembangunan pertahanan. di antaranya terpenuhnya pengadaan alutsista TNI dengan melanjutkan program Minimum Essential Force (MEF), untuk meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan alutsista, meningkatkan peran industri pertahanan dalam pengadaan alutsista, dan meningkatkan kemampuan serta penguasaan teknologi industri pertahanan RPJM pertama tahun 2005-2009, pada tahapan kedua 2010-2014, ketiga tahapan ketiga 2015-2020, dan tahapan keempat 2020-2024 merupakan empat tahapan pelaksanaan RPJPN tahun 2005-2025. Dan setiap tahap berlangsung selama lima tahun. Empat bidang pengembangan MEF adalah sebagai berikut: 1) Rematerialisasi, yaitu pengurangan hingga 100% pemenuhan daftar personel dan peralatan atau tabel organisasi dan peralatan. 2) Revitalisasi adalah penebalan atau peningkatan strata unit sebagai respons terhadap perubahan risiko pada area penempatan. 3) Relokasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan unit atau orang dari suatu wilayah dimana terdapat risiko besar terjadinya berbagai bahaya nyata ke wilayah lain. 4) Pengadaan adalah pembangunan satuan staf baru dan pembelian peralatan Sistem Senjata Utama (Alutsista).

Posisi tingkat pertahanan Indonesia cukup meningkat. Pemerintah telah menunjukkan sebuah komitmennya untuk membangun dan mengembangkan Industri pertahanan yang mandiri. Ditjen Pothan Kemhan memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan semua proses pada potensi industri dan untuk memenuhi kebutuhan Alpalhankam secara mandiri dalam mencapai dan menjaga kepentingan, kerjasama selalu menjadi pilihan utama negara. Pada pelaksanakannya, negara dapat menggunakan semua sumber daya yang dimiliki banyak arah kekuatannya, termasuk kekuatan militer, ekonomi, politik, dan intelijen. Hal yang tidak terhindarkan lagi sekarang adalah penggunaan militer sebagai alat untuk kolaborasi (Anwar, 2016).

Untuk itu, sebuah landasan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengembangkan industri pertahanan nasional. Sementara itu mengurangi ketergantungan impor, industri pertahanan diminta untuk melakukan tindakan untuk mengganti impor dan meningkatkan komponen lokal. Berjalannya upaya industri pertahanan harus juga meningkatkan penguasaan manufaktur dan teknologi kerjasama, dengan pemeliharaan. Penggunaan teknologi tinggi diperlukan untuk membangun dan mendayagunakan industri pertahanan, ini memungkinkan penguasaan teknologi yang cepat dan penentuan program prioritas pertahanan.

Undang-undang tersebut menganggap industri pertahanan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan alutsista nasional dan sebagai bagian penting dari rantai pasokan industri strategis, dalam kerjasama pertahanan juga mencakup teknologi yang tersedia. Pada konteks hubungan bilateral Indonesia dan korea selatan berada posisi yang saling melengkapi kedua negara berpotensi untuk saling mengisi satu sama lain. Mengutip Nuechterlein (1973) kepentingan adalah kebutuhan yang dirasakan suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain, lingkungan eksternal suatu negara mempunyai dampak yang signifikan terhadap perspektif eksternalnya. Dipihak indonesia memerlukan modal/investasi teknologi dan produk teknologi dan juga Kepentingan nasional Indonesia terkait langsung dengan stabilitas regional dan perdamaian global, dinamika dunia dan regional menyebabkan banyak konflik yang memungkinkan Indonesia terjebak dalamnya. Dengan sejalan nya kepentingan Indonesia, maka Indonesia kerjasama militer dengan Korea Selatan melalui pengembangan alutsista (Kanzi , 2022).

Disisi Korea Selatan Stabilitas ekonomi secara langsung dipengaruhi oleh keamanan dan stabilitas nasional dan Korea Selatan membutuhkan lingkungan yang aman untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya karena ketergantungan nya pada ekspor dan integrasi global. Selain memberikan pertahanan terhadap serangan bersenjata, keamanan kerjasama memastikan stabilitas yang diperlukan untuk investasi dan perdagangan transnasional. Stabilitas ekonomi secara langsung dipengaruhi oleh keamanan dan stabilitas nasional (Kusmanto, 2016) Aman dari ancaman luar, Korea Selatan dapat berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonominya dan menarik investasi internasional, yang diperlukan untuk ekspansi ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kepadatan kolaborasi yang tinggi meningkatkan status dan kredibilitas Korea Selatan di luar negeri. Untuk itu Korea Selatan memerlukan sumber alam/mineral, tenaga kerja dan pasar Indonesia yang besar dan Korea Selatan merupakan alternatif sumber teknologi

khususnya di bidang heavy industry, dan telekomunikasi. Afiff Tjarsono (2016), Dengan posisi Korea Selatan terletak di kawasan yang penting dan dinamis secara strategis. Korea Selatan, sebagai negara demokrasi yang mendukung pasar bebas, sangat penting dalam menjaga keamanan regional karena dikelilingi oleh negara-negara kuat seperti Tiongkok, Rusia, dan Jepang, yang telah lama bermusuhan dengan Korea. Untuk itu, Kerjasama pertahanan dengan negara-negara tetangga seperti Australia dan Jepang juga penting. Kerjasama dalam proyek pertahanan, pembagian informasi intelijen, dan latihan militer gabungan merupakan beberapa cara untuk memperkuat keamanan kawasan. lebih jauh, untuk meningkatkan kerja sama keamanan di kawasan Asia-Pasifik, Korea Selatan secara aktif terlibat dalam forum keamanan regional termasuk ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus). Nanda *et al.*, (2019) Dengan Kerjasama pertahanan memungkinkan akses ke teknologi dan pengetahuan militer dari negara-negara maju, mempercepat proses modernisasi ini. Dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, Korea Selatan fokus pada modernisasi militernya. Ini termasuk pengembangan teknologi militer canggih, pengadaan peralatan militer mutakhir, dan peningkatan kapabilitas tempur

Kerjasama Indonesia Korea Selatan

Pengadaan Alutsista

Indonesia memiliki ruang terbuka untuk kerjasama, Untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Defense Sector). Menhan Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan melanjutkan pertemuan dengan Menhan Suh Wook dalam pertemuan pertahanan ini, delegasi dari kedua belah pihak berbicara tentang beberapa hal strategis tentang pertahanan dan keamanan. Hal ini memerlukan kolaborasi dan diskusi mengenai keamanan regional. Kementerian Pertahanan Republik Korea berdedikasi untuk memupuk hubungan kerja sama pertahanan yang semakin erat. Salah satu bentuk nota kesepahaman (MoU) kerjasama kedua negara adalah peluang baru untuk meningkatkan industri militer, memperoleh akses terhadap teknologi terkini, dan mempererat hubungan di bidang pertahanan, termasuk alutsista negara. Mou di bidang Industri Pertahanan, Mou tersebut di tandatangani menandai kerja sama antara Indonesia dan Korsel dalam industri pertahanan. Isi dari Mou tersebut tentang program peninjauan teknologi ulang pesawat KF-X/IFX

Indonesia berkerjasama dengan Korea Selatan sejak 2010, Lalu Indonesia melanjutkan kerjasama partner produksi alutsista dan di kembangkan oleh kedua negara pada tahun 2019-2022. Indonesia mengeluarkan kebijakan kerjasama dengan adanya pembagian di kedua negara Diantaranya daftar alutsista partner kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan: Unit Kerjasama Anggaran KF-21 Borame 24,8

Trilliun Kapal Selam KRI- Alguro-405 Submarine 1,5 Trilliun Pesawat T50i 3,4 Trilliun KT-1 Wong Bee 456,6 Miliar.

Diantaranya Faktor-faktor pendukung kerjasama : 1) Faktor Ekonomi : Karena keterbatasan finansial, Indonesia saat ini terpaksa untuk membeli kapal bekas dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan alutsista yang tergolong tertinggal, tanpa memperhitungkan kondisi kapal secara keseluruhan. Namun anggarannya akan lebih rendah karena PT. PAL memberikan akses persenjataan dan kemampuan tempur saat membeli perbekalan pertahanan. 2) Faktor Alih Teknologi : Indonesia mendapat manfaat khusus dari agenda transfer teknologi yang telah disahkan. Di antaranya, Indonesia dapat setidaknya menghemat anggaran untuk penelitian dan pengembangan teknologi yang diinginkan.

Selain itu mereka dapat mengembangkan teknologi yang sudah mereka miliki melalui transfer teknologi tersebut. Salah satu cara yang efektif untuk mendukung teknologi di era yang serba kuat adalah transfer teknologi sebagai negara keberadaan kapal selam atau alutsista lainnya sangat penting untuk menjaga wilayah. Namun anggaran pemerintah seringkali menghalangi pengadaan kapal selam dan diharapkan produksi kapal selam dan kapal perang mandiri dapat dengan mudah memenuhi permintaan di masa depan. 3) Faktor Militer : Indonesia dan Korea Selatan memiliki kedekatan cukup erat yang dengan di laksanakan nya latihan-latihan militer bersama Presidential Security Service (PSS) dan Latihan Anti Teror. Dalam kerjasama pertahanan, tentu hambatan dan permasalahan dalam membangun produksi kerjasama pasti memungkinkan. Selain itu masalah, dan tantangan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan 1.) Tuduhan Insinyur Indonesia yang bekerja Korea Aerospace Industries (KAI) dituduh berupaya membocorkan data rahasia tentang pesawat tempur korea KF-21. Dalam insiden tersebut melibatkan dua Insinyur yang mencoba menyimpan informasi sensitif delapan drive USB, menurut Yonhap Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA). Informasi tersebut mencakup detail tentang avionik, seperti radar Advanced Electronically Scanned Array (AESA), yang dikembangkan di dalam negeri dan melengkapi pesawat tempur tersebut. 2.) Hambatan pendanaan, Indonesia memiliki hutang dan pihak korsel ingin pihak Indonesia melunasi proyek KFX-IFX. Didalam kontrak kerjasama tersebut pihak Pemerintah Korsel menanggung 60% dari kontrak kerja sama, dan Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI) masing-masing menerima 20% sisanya. 3.) Berkaitan sistem perjanjian, dan hak pemasaran. Ketiga, masalah ini harus segera diselesaikan agar proyek dapat berhasil. Moeldoko menyatakan 28 bahwa, selain harmonisasi kerja sama kedua negara, juga ada masalah transfer teknologi dari proyek jet tempur.

Pengembangan SDM

Pengembangan industri pertahanan membutuhkan manajemen yang berpikiran maju untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas, membangun daya saing, dan mengandalkan tenaga kerja yang cerdas dan idealis. Percepatan Proses kemandirian industri pertahanan nasional, yang berarti kemampuan sendiri, kebebasan, dan

ketidaktergantungan, membutuhkan kerja sama sinergis antara 49 pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri.

Apalagi, berkaitan dengan prinsip umum tuntutan kesejahteraan (UU 3/2002, pasal 3) pemberdayaan industri pertahanan (Nasional) akan selalu diarahkan untuk mendukung, mendukung, dan meningkatkan kemampuan pertahanan militer yang melebihi kekuatan minimal. Ini akan memberikan prioritas 50 pada alutsista TNI yang mandiri, modern, maju, dan masif. Beberapa fokus utama perwujudannya adalah sebagai berikut : - Program penelitian dan pengembangan (Litbang) Kemhan terkait alat peralatan pertahanan - Pengembangan teknologi dan industri pertahanan dan produk alutsista dalam negeri - Sinergi selektif antara tiga pilar pelaku Iptek, yaitu industri, industri, dan pengguna (TNI sebagai pengguna) - Kerjasama litbang di bidang Iptek dan industri pertahanan. Selain itu, program unggulan strategis rancang bangun dan rekayasa teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan prioritas transfer teknologi yang diperlukan terus dilakukan. Selain itu, hal-hal berikut dapat dicapai untuk meningkatkan sumber daya manusia industri pertahanan: 1.) Identifikasi bakat dan kemampuan keterampilan yang diperlukan untuk membuat komponen atau produk tertentu 2.) Menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, menarik, dan kolaboratif 3.) menyediakan program pelatihan yang tepat, praktis, dan efektif untuk memenuhi kebutuhan. Pengembangan itu dapat berkolaborasi dengan khususnya pemerintah dengan menggandeng lembaga akademis, asosiasi, Persastuan Insinyur, dan pihak lain yang bergerak dalam pengembangan teknologi sektor pertahanan

Pengembangan Alih Teknologi Pertahanan

Indonesia melakukan kegiatan kerjasama bersama dengan negara lain di bidang pertahanan, termasuk pada pelatihan militer secara bersama, pengadaan alutsista, dan modern alutsista. Indonesia menargetkan mencapai penuhnya alutsista TNI melalui pelanjutan adanya program melalui Minimum Essential Force (MEF). Dan adanya kegiatan bersama atau transfer teknologi (ToT), atau dalam kata lain "alih".

Sesuai dengan program, Indonesia membuat program Kapal Selam, pemerintah melaksanakan kerjasama dengan pemerintahan Korea Selatan. Yang dimana kerjasama itu yang diwakili PT.Pindad dan pemerintah korea selatan lewati perusahaan Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering (DSME) yang telah di percaya sebagai memproduksi alutsista kapal selam berbasis teknologi.

Angkatan Laut Korea Selatan melakukan pemesanan khusus terhadap kapal selam ini dalam upaya memperluas armadanya, yang saat ini hanya terdiri dari kelas midget U209/1200 dan U214/1800. Proyek desain kapal selam seberat 3000 ton ini dimulai pada awal tahun 2015, dan pembangunannya dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2016.dalam proses pembangunan. Sebanyak 206 insinyur dipilih oleh PT. PAL Indonesia dan DSME Daewoo menjadi spesialis dalam pembuatan kapal dan kapal selam. Bayu Wicaksono, Manajer Humas PT P AL Indonesia, 52 mengumumkan bahwa 120 orang di antaranya akan dipilih menjadi perancang kapal selam dan 186 lainnya akan dipilih

menjadi perancang kapal selam Prinsip-prinsip Transfer Teknologi diantaranya : 1.) Teknologi dipilih sesuai dengan kebutuhan 2.) Teknologi harus digunakan setelah disesuaikan dengan kondisi daerah 3.) Tenaga lokal harus melakukan perbaikan, imitasi, dan perbaikan import 4.) Pelatihan yang efektif harus diberikan oleh personel asing

Beberapa faktor transfer teknologi dari satu ketempat lain, yang dimana faktor perpindahan teknologi. Terjadi dalam beberapa cara, seperti: 1) Mempekerjakan personel dengan pengetahuan khusus di bidangnya. Oleh karena itu, negara-negara berkembang dapat dengan mudah memperoleh teknologi, termasuk metode dan prosedur produksi, khususnya teknologi yang belum dipatenkan. 2) Memasok mesin dan peralatan lainnya melalui perjanjian unik dengan perusahaan yang mahir secara teknologi. 3) Untuk memberikan kemampuan kepada setiap orang atau badan dalam memanfaatkan teknologi yang dilisensikan, tandatangani perjanjian lisensi teknologi dengan pemilik teknologi. 4) Konsultasikan dengan pemilik teknologi untuk mendapatkan saran dan pengetahuan teknis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Diplomasi Kerjasama Pertahanan Indonesia – Korea Selatan dalam Pengadaan Alutsista (2019-2022) memberikan beberapa kesimpulan, seperti : Pertama, Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan telah berlangsung beberapa dekade. Indonesia menjadi partner terbaik dalam kerjasama baik dalam bidang pertahanan, maupun bidang lainnya. Pemilihan kerjasama dengan korsel sejalan dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara dan juga faktor ekonomi yang terbatas. Kedua, kerjasama Indonesia ini memiliki tujuan agar industri pertahanan memasuki industri mandiri. Dengan kekurangan teknologi dan sumber daya manusia. Diharapkan kerjasama ini menjadi landasan untuk Indonesia agar bisa membangun industri dengan ilmu-ilmu yang sudah di terapkan dengan kerjasama dengan korsel. Dibandingkan dengan Indonesia, Korsel memiliki keunggulan pertahanan secara teknis. Ketiga, pada bidang pertahanan kerjasama Indonesia dan korsel dalam pengadaan alutsista diunggulkan pada pembuatan secara bersama atau alih teknologi yaitu, Pesawat KFX/IFX dan Kapal Selam. Sesuai dengan dan arah kebijakan pembangunan pertahanan. di antaranya terpenuhnya alutsista TNI dengan melanjutkan program Minimum Essential Force (MEF). Keempat, adapun faktor faktor penghambat dalam kerjasama tentu ada hambatan. 1.) Tuduhan Insinyur Indonesia yang bekerja Korea Aerospace Industries (KAI) dituduh berupaya membocorkan data rahasia tentang pesawat tempur korea KF-21, 2.) Hambatan pendanaan, Indonesia memiliki hutang dan pihak korsel ingin pihak Indonesia melunasi proyek KFX-IFX. 3.) Berkaitan sistem perjanjian, dan hak pemasaran.

REFERENSI

- Afiff, G. I., & Tjarsono, I. (2016). *Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama Militer dengan Korea Selatan dalam Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Anwar, S. (2016). *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Penduduk Wilayah Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2007). *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta, Vol.103
- Gindarsah, Iis (2016). "Strategic Hedging In Indonesia's Defence Diplomacy". *Defense & Security Analysis* 32. Vol.11
- Indonesia Defense. (2021). *Konsep Strategis Pertahanan Indonesia Masa Depan : Membangun Kekuatan Pertahanan Unggul Sustainable dari Bawah Laut*. Diambil kembali: <https://indonesiadefense.com/konsep-strategi-pertahanan-indonesia-masadepan-membangun-kekuatan-pertahanan-unggul-dan-sustainable-daribawah-laut/>
- Iqbal, M. (2021) *Prabowo Bicara Laut Cina Selatan*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210617013434-4-253743/di-depan-menhan-china-as-prabowo-bicara-laut-china-selatan>.
- Kanzi, Pratama. (2022). *Kerjasama Indonesia Korea Selatan KFX-IFX*. <https://www.kompasiana.com/kanzi75969/6363e9b64addee2c37784ba2/kerjasama-indonesia-korea-selatan-kf-x-if-x>
- Kementerian Pertahanan. (2019). *Eksistensi Tni Dalam Menghadapi Ancaman Militer Dan Nir Militer Multidimensional Di Era Milenial*. Diambil kembali dari Kemhan.go.id
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Mengelola Wilayah Perbatasan NKRI*. Diambil kembali : esdm.go.id
- Kusmanto, H. 2016. *Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. *Jurnal Lemhannas RI*. 4(1) :13-23.
- Lee, Kyung Hyung. (2015) "Konflik di Semenanjung Korea : Solusi Damai atas Kepemilikan Nuklir Korea Utara" dalam Djelantik, Sukawarsini. *AsiaPasifik : Konflik, Kerjasama, dan Relasi antar kawasan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor
- Nanda, C.A., Y. Swastanto dan A. Octavian. 2019. *Analisis Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Krisis Semenanjung Korea Guna Menjaga Stabilitas Kawasan Asia Tenggara*. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. 9(1) :71-90.
- Nuechterlein, D. E. (1973). *United States National Interests in a Changing World*. University Press of Kentucky.
- Park, Chang-kwoun. (2015). *Rethinking North Korea's Denuclearization : Approaches and Strategis*. Stockholm : Institute for Security and Development Policy.
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta: Sekretaris Negara RI.

- Peraturan Pemerintah RI. (2002). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jakarta: Sekretasis Negara RI.
- Purwanto. (2010). Peningkatan anggaran militer china dan implikasi terhadap keamanan di asia timur. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. 1-14.
- Reuters. (2024). Chinas Financial Clot Will be hard Reverse <https://www.reuters.com/breakingviews/chinas-financial-clout-will-be-hard-reverse-2024-03-04/>
- Robert J. Art and Robert Jervis. (2008). International Politics : Enduring Concepts and Contemporary Issues,. Cambridge, 145.
- Sinamora, Parulian . (2013). Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siregar, Ameilia Zuliyanti & Harahap. (2019). Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi. Sleman : Deepublish
- Sukmadinata, Nana Syaodih (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sulistiyani Pertiwi & Sari. (2021). Politica. Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Pemerintahan Joko Widodo, 85-87.
- Syawfi, I. (2009). Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008) Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 14.
- The Global Review. (2022). Pentingnya Minimum Essential Force <https://theglobal-review.com/pentingnya-minimum-essential-force-mefsebagai-strategi-kebijakan-pertahanan-indonesia/>
- Yang, S.-Y, & Mas'oed. (2004). Politik Luar Negeri Korea Selatan. PT. Kansius
- Yoga, G.V. 2020. Respon Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump Terhadap Program Nuklir Korea Utara. Journal of Diplomacy and International Studies. 3(1) :79-92.